

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Arab Saudi merupakan negara yang terletak di Jazirah Arab. Negara ini berbatasan langsung dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman dan Laut Merah. Arab Saudi mempunyai peran penting dalam percaturan dunia sesudah Nabi Muhammad SAW mengembangkan agama Islam, yang kemudian disambut baik oleh umat Islam seluruh dunia. Negara ini dari awal terbentuk telah menerapkan hukum Islam sebagai hukum negara. Bahkan Arab Saudi merupakan negara tempat berkumpulnya seluruh Umat Islam setiap tahunnya, khususnya ketika bulan haji tiba. Arab Saudi telah dikuasai oleh Keluarga Saud sejak sejak abad ke-12 Hijrah atau abad ke-18 Masehi.¹

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang masih menganut sistem monarki (kerajaan) ditengah gejolak proses demokratisasi yang terjadi di negara – negara jazirah arab. Setelah berdiri, struktur politik kerajaan Saudi mengalami perubahan bentuk patriarkhal keagamaan menjadi bentuk monarkhi dimana kekuasaan raja hanya dibatasi oleh hukum Islam atau syariah dan dimana raja sering membuat metafora bahwa rakyatnya adalah suatu keluarga besar. Guna mencapai stabilitas dan legitimasi politik, penguasa Arab Saudi menggunakan Islam sebagai

¹Badri, Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 25.

alat pemersatu bangsa. Dengan kata lain, legitimasi politik lebih bersumber pada kepemimpinan raja atau ideologi Islam dari pada bersumber pada struktur politik yang sudah mapan.²

Politik luar negeri Arab dalam kiprahnya selalu hadir di setiap gejolak konflik yang melanda Timur Tengah dimulainya tahun 2010 pada peristiwa *Arab Springs* dimana banyak terjadi pemberontakan – pemberontakan terhadap rezim pemerintahan negara – negara Timur Tengah yang otoriter sehingga terjadi sebuah transisi demokrasi didalamnya. Arab Saudi yang masih menggunakan struktur pemerintahan kerajaan tidak tinggal diam melihat fenomena transisi demokrasi yang terjadi di berbagai negara kawasan Timur Tengah. Untuk menghindari meluasnya gerakan revolusioner masuk ke Arab, Pemerintah Arab banyak terlibat dan berperan aktif di dalam konflik – konflik yang melanda negara – negara kawasan Timur Tengah. Peran pertama yang dimainkan Arab Saudi adalah pada saat terjadi demonstrasi rakyat di Tunisia yang berusaha menumbangkan diktator Zine ElAbidine Ben Ali. Ketika diktator Ben Ali melarikan diri dari Tunisia, Arab Saudilah yang memberikan tempat bagi pelarian mantan diktator Tunisia itu.³

Pada saat terjadi kabangkitan rakyat di Mesir yang menuntut pengunduran diri Hosni Mubarak, Arab Saudi dalam politik luar negerinya secara transparan

² Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2001, hal 76.

³ Voice Of Palestine, *Kenapa Arab Saudi Anti Revolusi Timur Tengah*
<http://Voiceofpalestine.Net/Artikel/Opini/685-Kenapa-Arab-Saudi-Anti-Revolusi-Timur-Tengah.Html>, diakses tanggal 30 Oktober 2015

memberikan dukungan langsung terhadap presiden ke-empat Mesir ini. Arab Saudi juga menentang sikap rakyat Mesir yang ingin menumbangkan rezim Mubarak. Ketika revolusi sampai ke Bahrain, Arab Saudi melakukan intervensi dalam upaya menumpas aksi demonstrasi yang dilakukan rakyat Bahrain terhadap pemerintahnya, Al Khalifa. Intervensi yang dilakukan Arab Saudi adalah dengan menempatkan pasukan militernya di Bahrain untuk menghadapi aksi rakyat yang menentang pemerintah.⁴ Pemerintah Arab Saudi juga aktif dalam menyikapi kebangkitan rakyat di Yaman. Secara langsung Arab Saudi ikut terlibat dalam seluruh krisis dan transformasi yang terjadi di Yaman.

Pada saat ini Yaman bisa dibilang sebagai bangsa baru yang lahir dari sebuah konflik perang saudara dimana rakyatnya masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Pemerintahan Yaman kini di hadapkan pada konflik baru terhadap lahirnya pemberontak Houthi yang berbasis di Yaman utara menentang pemerintahan Yaman dan berusaha menduduki Yaman. Arab Saudi yang sebelumnya sudah ikut berperan aktif dalam Konflik Yaman, kini ikut andil di dalam perlawanan melawan pemberontak Houthi dengan membantu Pemerintah Yaman.

Yaman adalah sebuah negara di Jazirah Arab di Asia Barat Daya, bagian dari Timur Tengah. Yaman berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah utara, disebelah selatan berbatasan dengan Laut Arab, disebelah timur berbatasan dengan Oman, dan

⁴ Daarut Tauhid <https://www.mail-archive.com/Daarut-Tauhid@YahooGroups.com/Msg11297.html> diakses tanggal 30 Oktober 2015

di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Aden dan Laut Merah. Penduduk Yaman diperkirakan berjumlah sekitar 23 juta jiwa (Juli 2008). Luas negara Yaman sekitar 530.000 km² dan wilayahnya meliputi lebih dari 2005 pulau. Yaman adalah satu-satunya negara republik di Jazirah Arab.⁵

Republik Yaman merupakan negara yang lahir dari proses unifikasi antara Yaman utara dengan Yaman selatan dan secara resmi berdiri sebagai negara yang berdaulat pada tanggal 22 Mei 1990. Ali Abdul Saleh terpilih sebagai Presiden pertama Republik Yaman kala itu. Penyatuan itu diharapkan mewujudkan sebuah negara yang integral dan sejahtera, namun kini justru terjadi konflik.⁶

Houthi merupakan kelompok pemberontak yang berbasis di Yaman Utara. Pengikut Houthi terkenal dengan sebutan Houthis. Penamaan ini dinisbatkan pada pencetusnya, Husein Badaruddin Houthi, yang berhaluan syiah.⁷ Pemberontak Houthi bermukim di sebelah Utara Yaman dan merupakan Yaman Utara dahulu sebelum bersatunya Yaman Utara dengan Yaman selatan, pemberontak ini sudah lama berusaha memlawanan Rezim Ali abduallah Saleh dan Houthi juga mempunyai banyak anggota, pada tahun 2005 saja tercatat sekitar 3000 orang dan meningkat pesat pada tahun 2009 sekitar 10.000 orang. Houthi juga mendapat dukungan yang luas oleh berbagai agama dan suku di daerah pegunungan Utara Yaman. Al-Houthi berhasil

⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Yaman> diakses tanggal 25 februari 2016

⁶<http://www.hidayatullah.com/kolom/analisa-dunia-islam/read/2014/10/20/31602/yaman-menuju-situasi-sebelum-1990-1.html> diakses tanggal 25 Februari 2016

⁷“*Menguak Konflik Yaman dan Dampaknya bagi Dunia Islam.*”

<http://www.erasuslim.com/berita/analisa/menguak-konflik-yaman-dan-dampaknya-bagi-dunia-islam.htm>, diunduh diakses pada 25 Agustus 2015

menarik simpati kelompok anti pemerintah yang ada di sejumlah propinsi sekitar yang selama ini simpati dengan perjuangan Houthi terutama provinsi Amran, Hajja dan Jaouf.

Awal peperangan melawan pemberontak Houthi terjadi pada tahun 2004 dimana terjadi demonstrasi besar – besaran. Orang-orang Houthi dipimpin oleh Husein Al-Houthi turun ke jalan menentang sikap pemerintah yang mendukung ekspansi Amerika ke Irak. Pemerintah Yaman merespon demonstrasi tersebut dengan sikap represif. Sejak saat itulah pemerintah Yaman menanggapi gerakan Houthi dan Syiah secara serius.⁸

Buah dari tanggapan pemerintah Yaman terhadap gerakan Houthi adalah dengan terbunuhnya pemimpin Houthi Husein Al-Houthi oleh militer Yaman di kota Sa'ada. Dengan terbunuhnya pemimpin Houthi, pemerintah Yaman berharap intensitas dari pemberontakan yang dilakukan Houthi akan mengendur. Namun kekuasaan gerakan Houthi tersebut kini diturunkan ke saudaranya yaitu Abdul Malik Al-Houthi.⁹

Pada Agustus 2009, pemerintah Yaman mulai bergerak secara ofensif dengan sandi operasi bernama "*operasi bumi hangus*", sebagai tindakan atas gerakan pemberontak Yaman. Pertempuran yang terjadi sebagian besar di wilayah pemerintahan Sa'adah di barat laut Yaman. Namun dalam operasinya melawan

⁸<https://kisahmuslim.com/4595-separatis-houthi-dan-revolusi-syiah-di-yaman.html> diakses 25 Februari 2016

⁹ Ibid

pemberontak Houthi, Pemerintah Yaman belum berhasil menumpas semua pengikut pemberontak Houthi. Hingga tanggal 21 september 2014, kekuasaan pemberontak Houthi kian menguat dengan takluknya ibukota Yaman, Sanaa oleh pemberontak Houthi. Oleh Manshour Hadi mengumumkan bahwa ibukota Yaman berpindah ke kota Aden karena ibukota Yaman telah diduduki pemberontak Houthi.¹⁰

Seperti halnya fenomena yang terjadi di negara – negara yang mengalami transisi demokrasi, Arab Saudi juga terlibat dengan Yaman. Hal ini dibuktikan ketika terjadi pergolakan demonstrasi menuntut turunnya tahta kursi kepresidenan yang di pimpin Ali Abdul Saleh yang dituding sebagai salah satu pemimpin diktator yang sangat otoriter. Arab Saudi ikut membantu memerangi demonstran. Namun upaya ini tidak berhasil dan pada akhirnya tanggal 24 Februari 2012, Presiden Ali Abdullah Saleh resmi mengundurkan diri dan jabatan kepresidenan kini dijabat oleh wakilnya yaitu Abed Rabbo Manshour Hadi.¹¹

Sejak berkuasanya presiden baru Yaman Abd Rabbo Manshour Hadi, pemberontakan semakin berkejolak. Ibukota Yaman, Sana'a telah jatuh ke tangan Houthi pada Februari 2015. Presiden Yaman sempat ditahan oleh pemberontak sebagai tahanan rumah, namun presiden Yaman berhasil kabur ke kota Aden. Manshour Hadi kemudian mengumumkan Kota Aden sebagai Ibukota Sementara Yaman. Pada tanggal 23 Maret 2015. Manshour Hadi kecam tindakan pemberontakan

¹⁰<http://www.re-tawon.com/2012/03/al-houthi-kelompok-pemberontak-dari.html> diakses tanggal 25 february 2016

¹¹<http://www.al-intima.com/akhbar-dauliyah/konflik-yaman-konflik-arab-saudi-iran> diakses pada tanggal 25 Februari 2016

oleh Houthi merupakan kudeta pemerintahan. Hadi menganggap Houthi melanggar keabsahan konstitusi pada pemerintahan Yaman. Oleh karena itu Manshor Hadi memutuskan untuk mengambil sikap politik luar negerinya dengan melayangkan surat kepada Negara-Negara kawasan teluk termasuk Arab Saudi. 26 Maret 2015, Arab Saudi merespon bantuan presiden Yaman bersama Negara-Negara dikawasan Timur-Tengah lainnya untuk membantu menahan pemberontakan.¹²

Keterlibatan Arab dengan Yaman mempunyai beberapa sebab dimana pemberontak Houthi yang beraliran Syiah termasuk menjadi indikasi Arab untuk terlibat. Dalam hal ini Arab yang berarti sebagai kelompok bermayoritas Sunni merasa posisi kedaulatannya terancam. Posisi Yaman yang strategis dan berbatasan langsung dengan Arab dapat menjadi pintu masuk yang lebar bagi Houthi maupun kelompok syiah lainnya dalam menyebarkan dogma nya ke Arab Saudi. Houthi yang diketahui juga mendapat bantuan dari Iran yang selama ini sebagai rival dari Arab Saudi, menjadi pemicu keras intervensi Arab ke Yaman.¹³

Dalam konflik Yaman ini, banyak aktor eksternal yang juga terlibat. Gulf Cooperation Council (GCC) yang biasa disebut sebagai koalisi teluk dan juga liga Arab telah memainkan perannya sebagai salah satu organisasi internasional yang selalu hadir di dalam konflik – konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Alasan keterlibatannya adalah untuk mencegah pemberontak Houthi menduduki

¹²<http://news.okezone.com/read/2015/03/28/18/1125649/kronologi-konflik-yaman-hingga-kini> 25
februari 2016

¹³ Ibid

Yaman.¹⁴Pada tanggal 14 April 2015, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan guna membahas masalah yang terjadi di Yaman. Pertemuan yang dihadiri Negara-negara yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC) termasuk Arab Saudi serta beberapa petinggi pemerintahan Yaman menghasilkan sebuah draft yang di beri nama resolusi 2216 dimana isi tersebut menjelaskan agar pihak yang bertikai di Konflik Yaman agar segera berdamai dan mengakhirinya.¹⁵

Juru bicara kementerian luar negeri Iran, Marzieh Afkham menyebut tindakan Arab Saudi yang mencampuri konflik internal Yaman adalah sebagai sebuah tindakan yang melanggar internasional dan kedaulatan nasional. Tindakan Arab Saudi dinilai sebagai sebuah tindakan yang menjadikan situasi lebih kompleks, memperluas konflik, dan menghentikan resolusi perdamaian di Yaman. Agresi Saudi tidak akan menghasilkan apapun, kecuali memudahkan penyebaran terorisme dan ekstremisme serta meningkatkan instabilitas di seluruh kawasan. Nasional parlemen Iran Alaedin Boroujerdi juga mengatakan bahwa Arab Saudi mengibas – ngibas kobaran api perang di kawasan Timur Tengah khususnya Yaman. Dia mengatakan bahwa tindakan lebih baik dilakukan melalui jalur politik.¹⁶

A. RUMUSAN MASALAH

¹⁴<http://www.beritadunia.net/berita-dunia/timur-tengah/perbandingan-antara-perilaku-israel-dan-arab-saudi-dalam-perang-di-gaza-dan-yaman> diakses tanggal 14 maret 2016

¹⁵<http://www.voaindonesia.com/content/dk-pbb-setujui-embargo-senjata-di-yaman/2718692.html> diakses tanggal 26 Februari 2016

¹⁶<http://nasional.sindonews.com/read/981933/149/saudi-pimpin-10-negara-bombardir-yaman-1427424169> diakses tanggal 14 maret 2016

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas dapat disimpulkan perumusan masalah sebagai berikut: *Bagaimana pola intervensi Arab Saudi dalam konflik Yaman?*

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk menjelaskan masalah diatas perlu diuraikan beberapa konsep dan teori, diantaranya adalah sebagai berikut :

Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Berarti teori adalah upaya mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan.¹⁷

Dalam kasus ini pada dasarnya memunculkan pertanyaan mengapa suatu negara berlaku sedemikian rupa dan bisa juga pertanyaan kondisi apa yang mendorong negara itu bertindak seperti itu dan bagaimana upaya yang dilakukan negara tersebut dalam mencapai tujuannya. Melihat dari pertanyaan-pertanyaan di atas, sehingga memunculkan sebuah teori untuk menjawab apa-apa yang menjadi pertanyaan di atas sehingga kita bisa mengetahui dan menganalisa dan tentunya harus dengan teori yang tepat sehingga tidak terjadi kerancuan ketika mencoba menjawab tema di atas. Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam intervensi Arab Saudi yang khususnya menyangkut hubungan antara pemberontak Houthi yang ada di

¹⁷Mohtar, Mas'oed. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, edisi revisi LP3S, Jakarta, 1990, hal.185.

Yaman dengan Arab dan intervensi apa saja yang dilakukan Arab dalam perlawanannya terhadap pemberontak Houthi.

Setiap negara mempunyai metode dan strategi yang beragam dalam rangka mencapai kepentingan nasional dan menerapkan kebijakan luarnegerinya. Berdasarkan perspektif kaum realisme, kekuatan negara berfokus pada pengembangan militer, karena kekuatan militer merupakan jalur alternative untuk memperluas kekuasaan. Mayoritas negara-negara besar menghalalkan segala cara demi mencapai kepentingannya, termasuk mengambil langkah intervensi militer.

Adapun Intervensi menurut Bikhu Parekh yakni upaya mencampuri urusan negara lain dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan fisik yang diakibatkan oleh disintegrasi atau penyalahgunaan kekuasaan dari suatu negaradan membantu menciptakan struktur pemerintah sipil agar terus berjalan. Oleh karenanya alasan pencegahan dari adanya penderitaan fisik atau kemunculan korban yang meluas yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan bentuk intervensi menjadi sebab yang dibenarkan untuk dilakukan.¹⁸ Menurut Adam Roberts, suatu negara mengintervensi secara militer tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan dapat bertujuan untuk mencegah penderitaan atau kematian yang meluas di antara penduduk.¹⁹

¹⁸ C. Chang. 2011. *Ethical Foreign Policy?: US Humanitarian Interventions*, Burlington. US: Ashgate Publishing. Hal. 11.

¹⁹ Reed and D. Ryall. 2007. *The Price of Peace: Just war in the twenty-first century*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Hal. 110.

Dari pengertian diatas aksi militer yang dimaksud yakni intervensi humaniter dengan situasi ketika sejumlah tindakan telah diambil untuk mencegah penderitaan yang diakibatkan oleh pemerintah represif atau konflik internal yang berkembang yang mana hak-hak politik dan sipil dari warga negara telah dilanggar. Intervensi militer didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan dengan melintasi perbatasan negara oleh kelompok negara dan organisasi regional dengan pembenaran alasan guna memulihkan perdamaian dan keamanan sebagaimana mengakhiri penderitaan dan pelanggaran HAM yang meluas melalui bantuan multilateral tanpa persetujuan dari negara yang mana intervensi tersebut terjadi.²⁰ Disini, terdapat keunggulan dalam menggunakan intervensi militer bagi suatu negara yakni diantaranya adalah untuk melindungi warga tidak berdosa maupun membantu untuk menjatuhkan rezim.

Menurut Martin Ortega terdapat 10 pola intervensi militer berdasarkan contoh sejarahnya²¹ yakni :

1. Pola imperialistik: negara kuat mengintervensi secara militer dinegara lain untuk memperoleh keuntungan, memperdalam kepentingannya, dan meningkatkan pengaruh terhadap negara target dan dunia internasional. Pola ini juga biasa disebut dengan intervensi hegemoni yang mana terjadi ketika negara hegemoni mengintervensi negara lain agar tidak lepas dari

²⁰ Anthony T. Eniayejuni. *The Role of The West and Military Intervention in Libya*. Diakses dalam situs: <http://www.foreignpolicyjournal.com/2012/04/07/the-role-of-the-west-and-militaryintervention-in-libya/> Pada tanggal 20 Oktober 2015.

²¹ Ortega, M. 2001. *Military Intervention and European Union*. Paris: *Institute for Security Studies Western European Union*. Hal 5.

pengaruhnya guna menjauhkan perkembangan politik tidak disukai oleh kepentingannya.

2. .Pola kolonial: kepentingan nasional dari negara kolonialis kuat dipaksakan terhadap negara lemah, perang candu terhadap China dan diplomasi gunboat terhadap Amerika Latin pada abad ke-19 adalah contoh dari pola ini.
3. Perimbangan kekuatan. Selama berabad-abad ciri utama yang mengatur hubungan antar negara Eropa adalah perimbangan kekuatan antar negara berdaulat yang mengakibatkan terjadinya nonintervensi. Akan tetapi perang dan intervensi terkadang digunakan sebagai alat untuk memperbaiki keseimbangan dan mencegah transformasi dari sistem multipolar menjadi hegemoni yang didominasi oleh satu aktor. Dalam perang suksesi Spanyol, pada awal abad ke-18, justifikasi yang digunakan untuk intervensi asing adalah klaim dan pewaris tahta yang sah akan tetapi tujuan sebenarnya yakni mencegah Bourbon Perancis menjadi terlalu kuat.
4. Ideologi. Negara yang mengintervensi mencoba untuk mengubah sistem politik dari negara sasaran dengan alasan ideologi. Sebagai contoh, dari tahun 1815 sampai 1830 aliansi suci mengintervensi untuk mendukung rezim monarki ketika berhadapan dengan revolusi demokratik di Eropa. Sementara intervensi AS di tahun 1980-an dirancang untuk menegakkan demokrasi.

5. Penentuan nasib sendiri, intervensi dalam perang saudara bisa jadi mempunyai motif imperialistik atau ideologi, tapi niat yang ada terkadang untuk mendukung salah satu pihak yang mengklaim hak penentuan nasib sendiri. Persamaannya, intervensi asing juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang sedang berjuang melawan pendudukan kolonial.
6. Membela diri. Angkatan bersenjata digunakan negara untuk membalas serangan dari pihak-pihak yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintahnya. Tujuan dari intervensi ini tidak untuk menggulingkan pemerintah dari negara sasaran, tapi untuk mencegah serangan. Israel pada tahun 1980-an dan Turki di utara Irak sering mengintervensi berdasarkan pola ini.
7. Pola intervensi era Perang Dingin. Antara 1945 dan 1990 dua negara adidaya mengintervensi di wilayah yang dipersengketakan baik dalam pola imperialistik atau ideologi. Pola ini meluas pada masa dekolonisasi dalam sistem lingkungan bipolar yang tidak biasa sehingga pola baru intervensi dapat ditetapkan. Contohnya yakni intervensi Uni Soviet di Hongaria pada tahun 1956 dan Afghanistan tahun 1979, atau intervensi Amerika Serikat dalam perang saudara Vietnam dari tahun 1964.
8. Intervensi Humaniter. Satu atau dua kelompok negara menggunakan angkatan bersenjata untuk meredakan penderitaan manusia dalam wilayah negara lain. Terdapat dua situasi yang dibedakan antara lain; perlindungan

warga negara di luar negeri, seperti intervensi Israel tahun 1976 di Enetebbe Uganda, atau perlindungan penduduk negara lain atau minoritas dalam contoh bencana kemanusiaan yang diprovokasi oleh pemerintah, seperti yang terjadi pada tahun 1991 dalam Operasi provide comfort di Irak utara.

9. **Intervensi Kolektif.** Komunitas internasional secara keseluruhan memutuskan untuk mengintervensi secara militer dalam suatu negara untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Terdapat dua perbedaan antara pola ini dan pola sebelumnya yakni pihak yang mengotorisasi intervensi ini adalah Dewan Keamanan PBB yang mewakili komunitas internasional tanpa berlandaskan fakta bahwa intervensi tersebut dilakukan oleh satu atau beberapa negara atau organisasi internasional yang bertujuan untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tipe intervensi ini hanya mungkin terjadi dalam masyarakat suatu negara yang telah diorganisasikan dengan wewenang umum. Intervensi dengan kekuatan yang disahkan oleh DK PBB sepanjang tahun 1990-an terjadi di Irak, Somalia, Bosnia, Haiti dan Timor Timur.
10. **Intervensi untuk penghukuman.** Beberapa negara melakukan serangan pada negara lain untuk menghukum kesalahan yang dilakukan terhadap negara lain. Serangan AS pada Libya tahun 1996, serangan rudal AS

terhadap target di Sudan dan Afghanistan pada 1998 masuk dalam kategori ini

Intervensi militer umumnya banyak dilakukan oleh negara-negara yang mempunyai kekuatan besar dalam rangka memenuhi kepentingan nasional ataupun kepentingan luar negerinya.

Berdasarkan pengertian pada teori intervensi yang di kemukakan Martin Ortega, dalam menyikapi konflik yang terjadi di Yaman, terdapat 10 pola intervensi militer yang 2 diantaranya terdapat pada pola intervensi Arab di dalam konflik Yaman.

Dalam pola imperialistik, negara kuat yang mengintervensi secara militer adalah Arab Saudi dimana didalam nya terdapat sebuah kepentingan untuk menjauhkan Pemberontak Houthi menduduki pemerintahan Yaman. Karena keadaan geografis Yaman yang berbatasan langsung dengan Arab, dengan jatuhnya Yaman ke Houthi dapat memberikan dampak buruk bagi stabilitas Arab Saudi sendiri. Fenomena Arab Spring menjadi dalih keterlibatan Arab Saudi di Yaman dengan memberi dukungan Presiden Ali Abdullah Saleh yang telah kehilangan legitimasinya dan dianggap sebagai pemimpin diktator agar tidak turun dari jabatan kepresidenan sehingga transisi demokrasi tidak terjadi. Namun justru hegemoni terjadi ketika Arab Saudi gagal membendung para demonstran yang di dukung pemberontak Al-Houthi. Dalih-dalih atas surat permohonan bantuan langsung oleh presiden Yaman

selanjutnya, Abd Rabbo Manshor Hadi menjadi sebuah tindakan yang sah dalam Intervensi Langsung Arab Saudi dalam Konflik Yaman.

Selanjutnya adalah dalam pola intervensi kolektif. Intervensi ini melibatkan komunitas internasional yang terotorisasi oleh PBB. Mobilisasi yang dilakukan Arab Saudi telah melibatkan beberapa negara dan organisasi internasional seperti PBB, GCC, serta Amerika Serikat untuk bergabung melawan pemberontak Houthi di Yaman. Dengan hadirnya organisasi internasional yang ikut mendukung Arab Saudi, dapat dikatakan tindakan ini adalah upaya pembenaran atas keterlibatannya dalam konflik Yaman untuk mencegah tuduhan Iran yang menganggap Arab Saudi telah banyak mencampuri masalah internal Yaman.

C. HIPOTESA

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang digunakan, muncul hipotesa Arab Saudi melakukan intervensi dalam konflik di Yaman dengan cara :

1. Pola Intervensi Imperialistik menggunakan Militer
2. Intervensi Kolektif melakukan mobilisasi terhadap negara – negara yang tergabung di dalam liga arab, GCC, dan PBB serta Negara-Negara lainnya untuk membantu intervensinya di dalam konflik Yaman.

D. TUJUAN PEMILIHAN JUDUL

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan secara empiris bagaimana Arab Saudi mengintervensi Yaman dalam konflik Internal Yaman.
2. Menambah pemahaman dalam temuan-temuan akademis politik luar negeri Arab dalam mengintervensi Yaman.
3. Untuk mengaplikasikan Ilmu Teori - teori yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan dan menyesuaikan dengan permasalahan yang diambil serta posisi dalam studi Hubungan Internasional.
4. Sumbangan terhadap studi dan praktik Hubungan Internasional terutama dan Timur Tengah pada umumnya.

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Untuk membatasi persoalan agar tidak menyimpang terlalu jauh dari pembahasan dan untuk memudahkan penulis menganalisa dan memahami permasalahan yang ada, maka batasan waktunya adalah dari tahun 2010 dimana terjadi sebuah fenomena yang dikenal sebagai fenomena *Arab Springs*. Fenomena ini adalah sebuah fenomena transisi demokrasi yang terjadi di berbagai negara – negara di Timur Tengah. Lahirnya gerakan revolusioner menentang pemerintahan diktator menjadi sebuah alasan aksi tersebut. Gelombang revolusi berawal dari Tunisia dan berkembang di berbagai negara seperti Suriah, Libya hingga Yaman. Turunnya presiden Yaman Ali Abdullah Saleh pada tahun 2011 menjadi awal gerakan

pemberontak Yaman (Houthi) muncul ke permukaan secara terang – terangan hingga di tahun 2015.

G. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif analitik yaitu berusaha menggambarkan tentang bagaimana Intervensi Arab Saudi di dalam konflik Yaman.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa telaah pustaka (Library Research) yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di bahas berupa buku-buku, dokumen, jurnal, surat kabar atau majalah, dan artikel di situs-situs internet.

Data tersebut diperoleh dari beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, seperti dari perpustakaan dan lembaga-lembaga yang terkait, yaitu:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Perpustakaan American Corner Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika dari penulisan ini ditulis dalam lima bab dengan sub topik pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II politik dalam dan luar negeri Arab Saudi

Bab III berisi tentang konflik yang terjadi di Yaman meliputi sejarah Houthi, Konflik pemerintah Yaman dengan Houthi serta keterlibatan Arab Saudi

Bab IV berisi tentang faktor-faktor pola intervensi Arab Saudi dalam konflik Yaman.

Bab V kesimpulan.